

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KETAHANAN SOSIAL PADA KOMUNITAS MULTIKULTUR Studi di Kelurahan Perkamil Kecamatan Tikala Kota Manado

Mochamad Syawie

ABSTRAK

Kesadaran multikultur sebenarnya sudah muncul sejak negara Republik Indonesia terbentuk. Munculnya wacana multikulturalisme merupakan reaksi terhadap adanya pluralitas yang begitu kompleks di dalam masyarakat, yang di dalamnya tidak hanya pengakuan yang dibutuhkan tetapi juga kesadaran budaya yang inklusif. Bagaimana terjadi komunikasi dan pertukaran budaya yang saling berdialektis antar ragam komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat tanpa harus menyertai semangat atau ideologi untuk saling menunjukkan dan menganggap kebudayaan kelompoknya paling superior.

Permasalahan pokok kajian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya kemampuan komunitas dengan beberapa/beragam budaya dapat memiliki ketahanan sosial. Tujuan kajian ini adalah mengetahui gambaran komunitas yang memiliki beragam budaya namun kondisi ketahanan sosialnya relatif baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil analisis kajian mengungkapkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan yang menonjol di kalangan komunitas lokal untuk pemahaman tentang multikultur. Multikultural tidak terlepas dari faktor budaya masing-masing komunitas, toleransi antar umat, faktor kekeluargaan/kekerabatan dan faktor kesadaran untuk saling memahami. Faktor pendidikan dan ekonomi merupakan pendukung yang cukup signifikan terhadap daya tahan komunitas. Berfungsinya lembaga komunitas (forum antara umat beragama) cukup besar perannya sebagai peredam konflik.

Kata Kunci : Ketahanan Sosial dan Multikultural

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kebhinekaan atau heterogenitas merupakan faktor yang sangat diperhitungkan pada saat awal berdirinya negara dan pada masa perkembangannya. Elemen kebhinekaan ini berkaitan dengan apa yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai *primordial sentiment* sebagai lawan dari *civil politics*. *Primordial sentiment* atau *attachments* adalah sifat budaya dan tingkah laku politik pada suku (*tribe*), daerah (*region*), agama, kelompok etnik dan pengelompokan-pengelompokan sejenisnya yang bersifat "given" (Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi, 1998).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa pluralitas masyarakat Indonesia yang demikian itu terjadi. Keadaan/geografis yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 3.000 pulau yang terserak di suatu daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan lebih dari 1.000 mil dari

Utara ke Selatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya pluralitas suku bangsa di Indonesia (Tjong Tiat Liem, 1968, dalam Nasikun, 1991). Faktor yang kedua, yakni kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara samudera Indonesia dan Samudera Pasific, sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia.

Banyak orang, baik para ahli ilmu sosial, ekonomi, politik, birokrat dan bahkan orang awam sering menyebut bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan yang dimaksud biasanya mengacu pada banyaknya suku bangsa yang tinggal dan menetap di Indonesia, dan bahkan pengertian kebudayaanpun sering diungkapkan secara bersama dengan kesukubangsaan. Kemajemukan terkait dengan masyarakat yang artinya adalah masyarakat yang jamak (*plural society*), sehingga akan menunjuk pada kesukubangsaan yang jamak atau banyak (Bambang Rudito, 2004).

Pada perkembangan selanjutnya, dengan pola interaksi yang sangat intensif antar suku-suku bangsa yang ada dan juga antar masyarakat, maka terbentuk suatu model-medel kebudayaan yang sangat bervariasi dan sering disebut sebagai multikultur. *Multicultural society* mengacu pada masyarakat dengan keanekaan budaya, yang berarti bukan saja memiliki kebudayaan yang jamak atau banyak tetapi juga bervariasi, dan berbagai macam jenis.

Tentang berapa jumlah suku-bangsa yang sebenarnya ada di Indonesia, ternyata terdapat berbagai pendapat yang tidak sama di antara para ahli ilmu kemasyarakatan. Hildred Geertz, misalnya, menyebutkan adanya lebih dari 300 suku-bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. Skinner menyebutkan adanya lebih dari 35 suku bangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan adat yang tidak sama. Lebih daripada sekedar menyebutkan banyaknya suku bangsa di Indonesia, Skinner menggambarkan juga perbandingan besarnya suku-bangsa suku-bangsa tersebut. Beberapa suku bangsa yang tergolong paling besar di antaranya, demikian menurut Skinner, yaitu Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, dan Bugis, masing-masing memiliki jumlah anggota 36 juta, 12,5 juta, 5 juta, 2,7 juta, dan 2,4 juta orang pada tahun 1956. Delapan suku bangsa yang lain memiliki jumlah anggota antara 750.000 sampai 2 juta orang pada tahun yang sama, termasuk Bali dengan 1,6 juta, Batak Toba dengan 950.000 orang, sementara Sumbawa memiliki jumlah anggota sekitar 135.000 orang (Skinner, 1959, dalam Nasikun, 1991). Masih mengutip dari Nasikun, sumber lain data dari buku Statistik Hindia-Belanda (*Statistische Zakboekje voor Nederlandsch-Indie*, 1940), menggambarkan prosentase besarnya berbagai suku-bangsa di Indonesia pada tahun 1930 sebagai berikut: Jawa 47,02 persen, Sunda 14,53 persen, Madura 7,58 persen, Minangkabau 3,36 persen, Bugis 2,59 persen, Batak 2,04 persen, Bali 1,88 persen, Jakarta (Betawi) 1,66 persen, Melayu 1,61 persen, Banjar 1,52 persen, Aceh 1,41 persen, Palembang 1,30 persen, Sasak 1,12 persen, Dayak 1,10 persen, Makasar 1,09 persen, Toraja 0,94 persen, dan lain-lain 9,54 persen. Kendati angka-angka tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan puluhan tahun yang lalu, akan tetapi dengan pikiran bahwa

angka kelahiran dan angka kematian selama ini memiliki rata-rata yang sama bagi kebanyakan suku bangsa yang ada di Indonesia, maka angka-angka tersebut di atas barangkali masih dapat menggambarkan keadaan masa kini.

Berdasarkan hasil kajian tentang Sistem Ketahanan Sosial Di Daerah Rawan Konflik (Nuryana, Ed, 2000), di tiga provinsi (Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Sumatera Utara), ditemukan hal-hal yang menarik yang diperkirakan telah menjadi faktor penyebab tingginya tingkat ketahanan sosial masing-masing provinsi tersebut. Adapun temuan tersebut antara lain untuk Sulawesi Selatan (Kota Manado) terungkap adanya potensi konflik bisa terjadi karena heterogenitas etnis di masyarakat. Namun, ternyata Sulawesi Utara (Kota Manado) merupakan salah satu provinsi yang pada masa krisis multi dimensi dengan segala ikutannya antara lain kekacauan dan konflik, boleh dikatakan cenderung aman dan stabil. Karena hal ini didukung oleh budaya komunitas Minahasa yang dapat membentuk ketahanan sosial diantaranya adalah budaya gotong royong. Budaya gotong royong yang kuat muncul berkat peran agama, yaitu hubungan gereja-gereja dengan agama lain (Islam) relatif cukup baik. Diiringi penyampaian informasi-informasi yang benar dalam kelompok-kelompok yang cukup intensif pula.

Suku Minahasa atau lebih sering dikenal sebagai "orang Manado" selain menghuni Kabupaten Minahasa, juga menempati sebagian besar Kota Manado dan Kota Bitung. Atas dasar perbedaan bahasa dan dialek, suku Minahasa ini dapat dibagi menjadi sub suku: a) Tonsca, yang mendiami sekitar bagian timur laut, b) Tombulu, yang mendiami sekitar barat laut danau Tondano, c) Tontembuan, yang mendiami sekitar barat daya dan selatan Danau Tondano, d) Taulour, yang mendiami sekitar timur dan pesisir Danau Tondano, e) Tonsawang atau Tonsini, yang mendiami bagian tengah Minahasa Selatan, f) Ratahan dan g) Panosohan yang mendiami Minahasa bagian tenggara, serta h) Bantik di pesisir Manado (baca: Kalngie, 1983, Mangara Tambunan, dkk, 1995, dalam Nuryana, 2000).

Keberagaman tersebut yang mencerminkan multikulturalisme Indonesia dalam banyak hal memang diakui merupakan suatu

kebanggaan nasional karena menjadi assets nasional yang tidak ternilai harganya sehingga perlu dipertahankan keberadaannya. Bagi turis mancanegara kerkunjung ke Indonesia salah satu alasan mereka adalah karena menganggap Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki situs budaya multikultur (*multicultural heritage*) paling lengkap di dunia dan hingga sekarang masih bertahan, bahkan di sejumlah daerah kehidupan budaya etnis tertentu masih sangat kuat sehingga menjadi sebuah atraksi budaya yang menarik (Nuryana, 2003). Mereka datang ke Indonesia untuk menyaksikan keunikan budaya kita. Wisatawan mancanegara menganggap bahwa Indonesia adalah sebuah negara di dunia yang masih memiliki ciri-ciri kehidupan tradisional yang kuat di tengah-tengah kehidupan modern.

Di sisi lain, keberagaman sosial budaya dan agama dapat dipandang sebagai suatu ancaman yang menakutkan apabila dilihat dari perkembangan akhir-akhir ini tentang interaksis sosial antar-etnis yang kecenderungannya menuju konflik, baik konflik laten, konflik di permukaan dan konflik terbuka, disebabkan oleh perbedaan sosial budaya yang kurang dikelola dengan bijaksana. Dengan berbagai kejadian konflik akhir-akhir ini, masalah multikulturalisme sedang diuji, apakah ia cenderung menjadi sebuah kekayaan yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, atau menimbulkan disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa. Walaupun kedua kecenderungan tersebut sangat tergantung kepada bagaimana orang melihatnya dari paham optimisme atau pesimisme. Akan tetapi berbagai kejadian konflik tersebut merupakan fakta yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja mengingat ancaman yang demikian besar terhadap persatuan dan kesatuan.

Atas dasar latar belakang tersebut, kiranya dipandang perlu dan relevan melakukan pengkajian tentang Faktor-faktor Yang Berpengaruh terhadap Ketahanan Sosial pada Komunitas Multikultural.

B. Pokok Permasalahan

Perumusan masalah dalam pengkajian ini adalah faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial pada komunitas multikultural

C. Tujuan Penelitian

Tujuan kajian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial pada komunitas multikultural.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh melalui diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion (FGD), wawancara mendalam (*indepth interview*), dan studi literatur atau dokumentasi.

Adapun lokasi penelitian di Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado Sulawesi Utara, dengan pertimbangan di lokasi tersebut terdapat komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap memiliki kultur yang beraneka ragam baik dilihat dari perspektif agama maupun etnis.

Sumber data atau informasi diperoleh melalui para informan, yaitu mereka yang memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian ini, baik tokoh masyarakat maupun tokoh agama di lokasi penelitian.

II. KERANGKA KONSEPTUAL

A. Konsep Masyarakat dan Proses Perkembangannya

Masyarakat adalah sekelompok individu yang secara langsung atau tidak langsung saling berhubungan hingga merupakan sebuah satuan kehidupan yang mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dari kebudayaan yang dipunyai oleh masyarakat lain (Parsudi Suparlan, 2005 : 11). Sebagai satuan kehidupan, sebuah masyarakat biasanya menempati sebuah wilayah yang menjadi tempatnya hidup dan lestarinya masyarakat tersebut. Karena warga masyarakat tersebut hidup dan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada dalam wilayah tempat mereka itu hidup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka sebagai manusia, maka terdapat semacam keterikatan hubungan antara sebuah masyarakat dengan wilayah tempat masyarakat itu hidup.

Sebuah masyarakat merupakan sebuah struktur yang terdiri atas saling hubungan

peranan-peranan dan para warganya, yang peranan-peranan tersebut dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Saling hubungan diantara peranan-peranan ini mewujudkan struktur peranan-peranan yang biasanya terwujud sebagai pranata-pranata. Pranata-pranata itu terwujud dalam kehidupan manusia bermasyarakat untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup sebagai manusia, yang dianggap penting oleh masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 2005: 11). Melalui pranata-pranata yang ada, sebuah masyarakat dapat tetap lestari dan berkembang. Pranata-pranata yang ada dalam masyarakat, antara lain, adalah pranata keluarga, pranata ekonomi, pranata politik dan pranata agama.

Masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, menurut studi Furnivall (lihat Budi Rajab, 1996) merupakan suatu masyarakat majemuk, yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain terutama di dalam suatu kesatuan politik. Di dalam kehidupan politik masa itu, tanda paling jelas dari masyarakat Indonesia yang majemuk adalah tidak adanya kehendak bersama di antara berbagai kelompok masyarakat yang ada. Masyarakat Indonesia masa kolonial, bila dilihat sebagai keseluruhan, terdiri atas elemen-elemen yang satu sama lain saling terpisah, masing-masing lebih merupakan kumpulan individu-individu daripada sebagai kesatuan politik yang organis. Menurut Furnivall, di dalam setiap masyarakat senantiasa terdapat konflik kepentingan antarberbagai kelompok dan dalam masyarakat majemuk seperti di Hindia-Belanda konflik kepentingan itu menemukan sifatnya yang lebih tajam, karena perbedaan kepentingan ekonomi jatuh bersamaan dengan perbedaan rasial.

Clifford Geertz tampaknya juga setuju dengan konsep masyarakat majemuk yang diajukan Furnivall, dan kemajemukan ini dilihatnya masih terbawa sampai ke masa pasca kemerdekaan Indonesia (1963, dalam Budi Rajab, 1996). Hanya Geertz melihat pluralisme masyarakat tidak lagi bersifat vertikal, karena situasi dan kondisi politik sudah berubah.

Dalam konsepsi Geertz (1996) pengelompokan masyarakat Indonesia atas dasar ikatan primordial tersebut sangat

menyulitkan komunikasi satu sama lain, apalagi pembauran, karena masing-masing kelompok dalam berkomunikasi cenderung menggunakan kerangka budaya mereka sendiri dan kebudayaan ini merupakan landasan atau kerangka acuan (*frame of reference*) yang berisikan petunjuk-petunjuk baku bagi pengambilan tindakan (*blue-print of behavior*) dan telah berakar dengan cukup kuat melalui proses sosialisasi di dalam kelompok bersangkutan, sehingga sulit mengalami perubahan. Dalam konteks itulah, bila merujuk pada pendekatan Furnivall dan Geertz, kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan masalah krusial dalam mencapai integrasi nasional.

Masyarakat majemuk tidak hanya difokuskan perhatiannya pada keberagaman pada konteks kultural, tetapi juga ras, etnis dan kepentingan (William C Cockerham, 1995). Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Huntington (1995) ditemukan, bahwa konflik terjadi karena faktor ikatan kesukuan, keagamaan, kepentingan dan golongan. Dengan kata lain, bahwa keberagaman etnik, ras, agama, golongan, ekonomi, politik, institusi dan cultural akan membawa serta pada konteks potensi konflik jika tidak mampu dikelola, dan sebaliknya menjadi kuat jika dikelola dengan sebaik-baiknya, seperti pandangan Furnivall (1944) yang menegaskan bahwa masyarakat-masyarakat plural di Asia Tenggara akan terjerumus ke dalam anarkhi jika gagal menemukan formula federasi pluralis yang memadai.

Furnivall (1944:446) beranggapan, bahwa masyarakat plural adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal.

B. Konsep Multikultural

Multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan (Fay, 1996, dalam Akhyar Y Lubis, 2004). Dalam masyarakat multikultural, perbedaan budaya, perbedaan etnis, lokalitas, bahasa, dan ras dilihat sebagai mozaik yang memperindah masyarakat. Prinsip keaneragaman, perbedaan, kesederajatan,

persamaan, penghargaan pada demokrasi, hak asasi, dan solidaritas merupakan ideologi yang diperjuangkan dan dijunjung tinggi.

Kesadaran multikultur sebenarnya sudah muncul sejak negara Republik Indonesia terbentuk. Munculnya wacana multikulturalisme merupakan reaksi terhadap adanya pluralitas yang begitu kompleks di dalam masyarakat, yang di dalamnya tidak hanya pengakuan yang dibutuhkan tetapi juga kesadaran budaya yang inklusif. Bagaimana terjadi komunikasi dan pertukaran budaya yang saling berdialektis antar ragam komunitas (sosial) atau kelompok-kelompok masyarakat tanpa harus menyertai semangat atau ideologi untuk saling menundukkan dan menganggap kebudayaan kelompoknya paling superior (Ernalita, 2005).

Multikultur berarti budaya yang beraneka ragam. Budaya didefinisikan sebagai kebiasaan dan nilai-nilai tertentu yang diakui secara umum oleh suatu masyarakat yang tinggal di suatu tempat (Simon Fisher, et al., 2000). Budaya/kultur dimaknai sebagai identitas manusia yang biasanya dengan menggunakan simbol tertentu.

Masyarakat majemuk, masyarakat yang ditandai dengan adanya golongan-golongan sosial yang merupakan bagian yang mutlak dari masyarakat tersebut. Masing-masing golongan ini tetap mempertahankan jati dirinya. Hubungan antara satu golongan dengan golongan lainnya diatur dan dilakukan dengan menggunakan kebudayaan nasional. Dengan adanya peraturan yang dibuat untuk menyatukan seluruh bagian dalam masyarakat, maka hubungan antar golongan dalam masyarakat ini sebetulnya terjadi melalui suatu jenis penerapan aturan (Rudito, 2004).

Penggunaan kebudayaan yang bersandar pada tipe nasional akan selalu bertentangan dengan dengan penggunaan kebudayaan yang bersifat lokal atau kesukubangsaan atau komunitas. Masing-masing kebudayaan tersebut mempunyai cara pandang yang sendiri-sendiri, sehingga masalah sosial yang ada pada masing-masing komunitas harus dilihat melalui kacamata komunitas yang bersangkutan.

Hasil penelitian tentang Pola Rekonsiliasi Masyarakat Antar-Etnis (2003), yang dilakukan Puslit Permasalahan Sosial, terungkap bahwa

di Kalimantan Barat ada kecenderungan faktor budaya lebih dominan penyebab terjadinya konflik antar kelompok etnis baik antara kelompok etnik Madura dengan Dayak maupun Melayu dengan Madura. Sementara itu konflik antar kelompok etnis pendatang di Batam disebabkan kecemburuan sosial suatu etnis tertentu (etnis Flores terhadap etnis Batak, Bugis dan Palembang) dalam penguasaan lahan usaha strategis.

Perkembangan konflik ternyata tidak hanya melibatkan kelompok etnis seperti yang terjadi di Kalimantan Barat dan Riau, antar agama di Ambon dan Nusa Tenggara Barat atau antara golongan di Jawa Timur tetapi juga melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Konflik antar kelompok etnis bisa terjadi karena berbagai faktor, antara lain faktor budaya dimana terdapat pandangan stereotip negatif yakni menganggap budaya suku bangsa lain lebih rendah dari budayanya sendiri ataupun etnosentrisme, kecenderungan menilai budaya orang lain dengan budaya sendiri (Warnaen, 2002, dan Alex L dalam Wibowo, 1999).

Walaupun skalanya kecil, konflik yang terjadi di berbagai daerah tersebut merupakan sebuah gambaran nyata bahwa kehidupan multikultur di Indonesia sedang diuji. Apabila masyarakat berhasil menyelesaikan konflik tersebut, maka menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan sebuah negara multikultur yang mampu mempertahankan eksistensinya. Sedangkan bila hal itu gagal, merupakan bukti bahwa multikultur merupakan ancaman berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Indonesia (Nuryana, 2003). Demikian juga Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi (1998) menyatakan bahwa di Indonesia, kebhinekaan atau heterogenitas merupakan faktor yang sangat diperhitungkan pada awal berdirinya negara dan pada masa perkembangannya. Elemen kebhinekaan ini berkaitan dengan apa yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai *primordial sentiment*. *Primordial sentiment* atau *attachments* adalah sifat budaya dan tingkah laku politik pada suku, daerah dan agama, kelompok etnik dan pengelompokan-pengelompokan sejenisnya yang bersifat "given".

Pada perkembangan selanjutnya, dengan pola interaksi yang sangat intensif antar suku-suku bangsa yang ada dan juga antar

masyarakat, maka terbentuk model-model kebudayaan yang sangat bervariasi dan sering disebut sebagai multikultur. *Multicultural society* mengacu pada masyarakat dengan keanekaan budaya, yang berarti bukan saja memiliki kebudayaan yang jamak atau banyak tetapi juga bervariasi, berbagai macam jenis (lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994).

Yang terpenting adalah masyarakat multikultural memiliki dan menyepakati nilai-nilai multikulturalisme. Multikulturalisme adalah ide yang menekankan pentingnya saling penghormatan antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda, penghormatan yang memungkinkan setiap kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas, untuk mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa mengalami prasangka buruk dan permusuhan (DuBois dan Miley, 1992, dalam Suharto, tt).

Berdasarkan pandangan Herskovits, kultur berarti bagian dari lingkungan manusia yang merupakan hasil cipta manusia. Kultur subyektif adalah cara khas suatu komunitas kultur dalam memandang, atau dalam istilah teknisnya mempersepsi, lingkungannya yang merupakan hasil ciptaan manusia (baca Warnaen, 2002).

Komunitas kultur adalah suatu kolektif manusia yang warganya berbicara dalam bahasa yang sama dan sebagian besar mempunyai kegiatan yang serupa, misalnya mata pencaharian yang sama atau yang mempunyai ideologi yang sama, misalnya tergolong dalam golongan agama yang aktif.

Sepanjang perilaku, lembaga dan barang-barang adalah produk buatan manusia, pasti ada nilai budaya di dalamnya. Nilai budaya adalah suatu proses, sedangkan simbol budaya adalah hasil. Sebagai proses, ia selalu ikut membentuk sebuah produk kebudayaan. Nilai budaya berperan sebagai pembudayaan, pendidikan nilai. Oleh karenanya, kebudayaan perlu disandingkan dengan pendidikan (Kuntowijoyo, 2002). Mengapa kebudayaan perlu disandingkan dengan pendidikan. Karena pendidikan mempunyai tugas pokok, yaitu: 1). Mengajar keterampilan bertahan hidup, adaptasi dengan relung ekologis (pendidikan pragmatis). 2). Meneruskan tradisi budaya, mempersiapkan warga Negara sesuai dengan kepribadian

kelompok (enkulturasi), dan 3). Meningkatkan martabat manusia, karena evolusi moral tidak terjadi dengan sendirinya, dan manusia sangat sedikit bertambah maju dalam aspek ini (T.Jacob, 1988).

Tampaklah kiranya betapa eratnya hubungan antara pendidikan dan ketahanan nasional (sosial), karena pendidikan memang institusi budaya yang menyentuh hidup awal seorang manusia, dan merupakan alat utama ketahanan nasional (sosial). Selanjutnya aspek survival tentu saja penting dalam pendidikan dan ketahanan sosial. Sesudah hal itu tercapai, baru timbul soal survival yang bagaimana, dengan perkataan lain mutu bertahan hidup.

C. Konsep Tentang Ketahanan Sosial

Ketahanan Sosial Masyarakat adalah suatu kemampuan komunitas dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik. Suatu komunitas memiliki ketahanan sosial bila: mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial, mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan (Kepmensos RI, No: 12/HUK/2006, tentang Model Pemberdayaan Pranata Sosial dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial)

Ketahanan nasional adalah sikap dan ciri untuk dapat bertahan hidup sebagai suatu satuan populasi dalam perjuangan hidup di dunia yang makin interaktif antara komponen-komponennya (Jacob, 1988). Perjuangan hidup terdiri atas persaingan dan kerjasama, bukan dengan pelenyapan salah satu atau keduanya, melainkan dengan memanfaatkan keduanya.

Ketahanan sosial merupakan merupakan kondisi sekaligus aktifitas masyarakat dalam mempertahankan, beradaptasi, dan mengatasi berbagai perubahan yang terjadi, baik secara sosial, ekonomi dan politik, sehingga masyarakat tetap eksis dan berkembang menuju kesejahteraan yang diharapkan.

Ketahanan sosial masyarakat berkaitan dengan kemampuan komunitas mengatasi resiko sebagai akibat adanya perubahan sosial, ekonomi dan politik yang mengelilinginya. Apabila akan merumuskan konsep ketahanan sosial, cenderung dapat dilakukan dengan

pengkajian lapangan (*empirical study*) dengan mengembangkan berbagai asumsi, misalnya: masyarakat yang mempunyai ketahanan sosial adalah jika anggotanya merasa: dimanusiakan, terpenuhi kebutuhannya, dihormati martabat dan hak-haknya, aman dan dilindungi, damai dan tertib, serta sejahtera dan adil (lihat Sukoco, Nuryana, dkk, 2003).

Secara konseptual komunitas yang memiliki ketahanan sosial bila :

1) mampu melindungi secara efektif anggotanya, termasuk individu dan keluarga yang rentan dari perubahan sosial yang mempengaruhinya; 2) mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan, dan 3) mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan (2003). Jadi, tinggi rendahnya ketahanan sosial suatu komunitas cenderung ditentukan oleh efektif tidaknya mereka untuk : (1) melindungi anggotanya, (2) menanamkan investasi sosial dalam jaringan sosial, dan (3) mengelola konflik dan kekerasan. Hal itu disebabkan karena dimensi-dimensi outcomes dari proses integrasi dan reaksi dinamika organisasi/sistem sosial masyarakat adalah: pertama tingkat perlindungan yang dialami oleh kelompok rentan, kedua tingkat dukungan yang dinikmati oleh individu atau kelompok yang kurang mampu, ketiga tingkat partisipasi dalam bidang sosial-politik yang dapat diwujudkan oleh individu, kelompok dan keluarga, keempat tingkat pengendalian sosial terhadap kekerasan dan kelima tingkat pemeliharaan dalam pemanfaatan sumber daya alam sebagai dasar mata pencaharian lokal.

IV. TEMUAN LAPANGAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Kajian

Jumlah penduduk kelurahan Perkamil sebesar 6.415 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) 1.628 KK. Jumlah lingkungan (RW) ada 4 dan jumlah RT ada 29. Jumlah sekolah TK ada 3 dengan jumlah murid 89, dan jumlah guru ada 7 orang. SDN ada 5 buah dengan jumlah murid 1.135 dan jumlah guru 54 orang. SLTPN ada 1 buah dengan jumlah murid 803 dan jumlah guru 50 orang. Adapun

SMU Negeri ada 1 buah dengan jumlah murid 540 dan jumlah guru 46 orang.

Tabel 1 : Jenis Pekerjaan Penduduk Kel. Perkamil

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Buruh	1071
2	Pegawai Negeri	109
3	Tukang Batu	136
4	Tukang Kayu	70
5	Pedagang	20
6	Penjahit	23
7	Peternak	4
8	Pengrajin	3
9	Dokter	5
10	Montir	8
11	Sopir	86
12	TNI/Polri	18
13	Pengusaha	5

Sumber: Profil Kelurahan (2006)

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa jenis pekerjaan yang terbesar adalah sebagai buruh. Buruh yang dimaksud adalah swasta (industri dan jasa). Industri disini meliputi industri makanan (9 buah), industri mebel (6 buah) dan warung makan dan kios kelontong masing-masing 30 buah dan 12 buah. Jumlah koperasi ada 4 buah dengan jumlah anggota 410 orang (Kelembagaan Ekonomi, 2006). Karena Kelurahan Perkamil di daerah perkotaan maka mata pencaharian penduduknya cukup bervariasi. Bervariasinya jenis pekerjaan ini relatif memiliki kaitan dengan jumlah penduduk usia 15-60 tahun yang jumlahnya 4195. Adapun jumlah ibu rumah tangga ada 909 orang dan jumlah masih sekolah 878 orang (Profil Kelurahan, 2006).

Berdasarkan tingkat perkembangan penduduk (ekonomi masyarakat), terlihat bahwa jumlah angkatan kerja (usia 15-55 tahun) ada 1.136 orang, jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang masih sekolah 809 orang. Jumlah penduduk yang berusia 15-55 tahun yang bekerja penuh dan yang tidak tentu masing-masing berjumlah 817 dan 2.415 orang. Yang menarik dari data perkembangan penduduk ini boleh dikatakan bahwa minat untuk menuntut ilmu dan pengetahuan relatif cukup baik dilihat dari segi usia antara tersebut. Artinya sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu tokoh agama peserta diskusi kelompok terfokus di Balai Pertemuan Kelurahan Perkamil (28/11/2007) yaitu Musiran bahwa faktor

pendidikan mempunyai korelasi dengan kesadaran multikultur, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan cenderung memiliki nilai toleransi yang baik, dengan toleransi ini pemahaman tentang multikultur relatif mudah dicerna atau dimengerti, selain faktor ekonomi (pekerjaan), baik bagi penduduk yang memiliki pekerjaan tetap maupun tidak tetap. Selain kesadaran multikultur, dua faktor ini (pendidikan dan ekonomi) cenderung berkorelasi juga terhadap komunitas yang memiliki daya tahan sosial.

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Kel. Perkamil Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Tidak tamat SD/ sederajat	727
2	Tamat SD/sederajat	521
3	Tamat SLTP/sederajat	105
4	Tamat SLTA	214
5	Tamat D-1	150
6	Tamat D-2	60
7	Tamat D-3	150
8	Tamat S1	104
9	Tamat S2	15
10	Tamat S3	3

Sumber: Profil Kelurahan (2006)

Berdasarkan data tersebut di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk yang sampai pada tingkat perguruan tinggi relatif cukup besar yaitu 23,52 persen. Sungguhpun secara riil penduduk yang tidak tamat SD/ sederajat cukup besar yaitu 35,48 persen. Dari data tersebut boleh dikatakan bahwa di kelurahan Perkamil tingkat kesadaran untuk memperoleh pendidikan pada tingkat perguruan tinggi/akademi relatif cukup tinggi. Artinya data ini sesuai dengan keberadaan lembaga pendidikan di wilayah kajian, dan mendukung kualitas sumber daya yang diharapkan.

B. Pemahaman Komunitas Tentang Multikultural

Dari hasil *focus group discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terfokus yang dihadiri beberapa tokoh agama dan masyarakat yakni Musiran (dari unsur tokoh agama Islam), Robert (tokoh pemuda), Soros Tomijayo (tokoh agama) dan Johan Aldof (dari unsur tokoh masyarakat yang sekaligus sebagai pensiunan),

dan Nyoman Adananya (dari unsur warga Bali) yang dilakukan di kelurahan Perkamil pada tanggal 27 Nopember 2007 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman komunitas perihal multi-kulturalisme, diantaranya adalah:

- Adanya nilai atau budaya kekeluargaan dan keterbukaan diantara warga komunitas, hal ini dapat dilihat bila ada pendatang dianggap sebagai saudara, tidak mengenal asal, suku atau agama. Hal ini betul-betul mereka lakukan misalnya di lokasi kajian terdapat pengungsi korban konflik dari Maluku, pengungsi tersebut juga hadir dalam acara dialog ini yaitu Albert Huri, dan diterima dengan baik, dan dengan keterbukaan cenderung tidak ada saling kecurigaan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses ikatan persaudaraan antara warga asli dan pendatang semakin akrab/kuat dengan adanya akulturasi budaya. Akulturasi dapat terjadi misalnya melalui perkawinan antara warga setempat dengan pendatang. Adanya nilai egaliter pada komunitas lokal, yang menganggap pendatang tidak sebagai tamu tapi sebagai anggota keluarga. Nilai egalitarian ini merupakan sikap yang sangat menghargai orang lain tanpa dipengaruhi oleh status dan agama/kepercayaan yang dianut orang lain. Semua manusia adalah cenderung sama dan perlu dihargai serta dihormati seperti juga dirinya. Nilai seperti ini ternyata sangat dianut oleh sebagian besar komunitas sehingga pergaulan yang dilembagakan cenderung menumbuhkan persaudaraan daripada permusuhan. Atas dasar nilai ini ada indikasi kuat komunitas memahami pentingnya salah satu faktor makna multikultur dalam kehidupan dengan keberagaman budaya.
- Adanya nilai toleransi beragama boleh dikatakan bahwa secara mendasar setiap agama mengajarkan untuk menjaga harkat dan martabat kemanusiaan secara benar. Dari konsepsi ini yang penting adalah bagaimana agama dapat menjadi pembebas manusia dari ketertindasan, baik secara kultural maupun politis sehingga tugas yang dipangku oleh

masing-masing umat beragama adalah mendesak nilai-nilai luhur keagamaan yang termanifestasi dalam penghormatan terhadap harkat dan martabat kepada setiap manusia, demikian menurut pandangan beberapa tokoh agama lokal di lokasi kajian dalam acara fokus group discussion. Meminjam istilah atau pemikiran yang dikemukakan oleh Thomas O'dea bahwa agama secara fungsional akan bermakna apabila dapat bermanfaat bagi kehidupan umatnya. Dalam komunitas di lokasi kajian dirayakan hari-hari besar keagamaan seperti hari raya Idul Fitri dan Natal, mereka saling membantu dengan mengadakan acara bersama dan dalam ceramah-ceramah agama materinya berisi hal-hal yang menyejukkan masyarakat. Mereka berpendapat siapa yang menghormati agama orang berarti ia sedang mencintai agama sendiri.

- Hidup dalam iklim multikultural seperti sekarang ini menurut pandangan mereka, bahwa tertib sosial akan dapat terwujud jika setiap elemen masyarakat mampu bersikap toleran serta bersedia membuka diri bagi terciptanya kerja sama-kerja sama yang bersifat mutual.

Nampaknya muncul kesadaran bahwa persatuan/kebersamaan yang dibangun dengan jalan paksaan cenderung hanya akan berujung pada konflik sosial. Tanpa bermaksud menyederhanakan rumitnya persoalan hubungan antar etnik di dalam masyarakat, karena makna etnisitas sekarang ini cenderung lebih kompleks dari sekadar penjelasan tentang asal-usul ras manusia, tetapi juga terkait dengan sumber-sumber identitas lain, seperti agama, pekerjaan, pendidikan dan persoalan politik.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ketahanan sosial

Dengan adanya pemahaman komunitas tentang multikultural sebagaimana terungkap di atas, selanjutnya berdasarkan hasil focus group discussion (FGD) dapat diketahui bahwa ketahanan sosial komunitas akan muncul bila terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut:

- Adanya tingkat ekonomi yang relatif baik, artinya komunitas tersebut anggotanya

memiliki pekerjaan. Dengan memiliki pekerjaan berarti memiliki pendapatan, selanjutnya dengan pendapatan tersebut anggota keluarga mereka relatif dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut warga masyarakat cenderung memiliki daya tahan, demikian rangkuman pandangan beberapa tokoh lokal dalam forum dialog di kelurahan Perkamil.

- Melaksanakan agama dengan baik, artinya komunitas di lokasi kajian umatnya tekun melaksanakan ibadah berdasarkan keyakinannya masing-masing. Jadi faktor manusianya memegang peranan penting, dengan perkataan lain individu-individunya dapat berperilaku baik. Yang menarik para peserta dialog/diskusi sepakat bahwa ketekunan beribadah mempunyai korelasi/hubungan dengan ketentraman warga.
- Komunitasnya relatif berpendidikan.

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus bersama tokoh masyarakat lokal terungkap bahwa dengan kualitas pendidikan yang relatif baik, warga masyarakat cenderung dapat mengkritisi masalah-masalah sosial yang dihadapi, yang selanjutnya terkesan memiliki daya tahan yang relatif cukup baik dan lebih toleran dengan keberagaman budaya diantara kelompok-kelompok masyarakat.

Pluralisme kebudayaan ini memang idealnya dapat disikapi sebagai medan pertukaran simbolik yang produktif dan komplementer. Pada ranah praktis, tidak adanya kekuatan dominan sebagaimana yang dianut multikulturalisme juga memberi peluang bagi terjadinya persilangan kategori-kategori identitas ketika setiap pihak ditemukan dalam kepentingannya yang sama. Selanjutnya identitas sosial menjadi lebih mudah ditembus sehingga memungkinkan terciptanya identitas baru yang terbentuk dari persilangan kategori-kategori sosial yang didasari atas kesadaran untuk mencari simpul kerja sama yang mutual dalam ruang publik.

Berangkat dari pemahaman bahwa setiap ekspresi kebudayaan memiliki nilai-nilai positifnya masing-masing dan tidak ada superioritas satu budaya atas budaya lainnya, sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual, keragaman budaya seharusnya bisa menjadi modal sosial dan tidak mengarah kepada proses saling mengeksklusi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor budaya, antara lain budaya kekeluargaan/gotong-royong, kekerabatan dan kesadaran merupakan faktor yang berpengaruh munculnya ketahanan sosial pada komunitas yang beragam budayanya. Dengan adanya tahan sosial ini pada batas-batas tertentu komunitas juga memiliki pemahaman multikulturalisme yang relatif baik juga.
2. Faktor pendidikan dan ekonomi merupakan pendukung yang cukup signifikan. Dengan kualitas pendidikan yang relatif baik hal ini cenderung memudahkan warga komunitas untuk terserap dalam lapangan pekerjaan, selanjutnya dengan adanya pekerjaan ada indikasi kuat warga memiliki daya tahan yang relatif baik. Selain ini, faktor pendidikan dan ekonomi juga berpengaruh dalam memahami nilai-nilai multikulturalisme.

3. Peranan forum komunikasi atau kelembagaan boleh dikatakan mempunyai fungsi sebagai sarana yang memunculkan nilai-nilai kebersamaan. Hal ini dapat dilihat bagaimana peran Forum Kerjasama Antar Umat yang ada, dalam kegiatannya antara lain mengadakan dialog secara intensif diantara umat, khususnya bila ada masalah-masalah yang muncul diantara warga komunitas.

B. Saran

Dari hasil pengkajian ini, yang perlu memperoleh perhatian adalah faktor pendidikan merupakan modal utama yang mempengaruhi tingkat ketahanan sosial sebuah komunitas multikultur selain faktor agama serta faktor ekonomi. Sehubungan dengan hal ini investasi bidang pendidikan, peran ekonomi dan intensitas ketekunan beribadah merupakan variabel kunci apabila akan meningkatkan ketahanan sosial dalam sebuah komunitas.

Selain ini, peran tokoh masyarakat baik tokoh agama maupun tokoh adat perlu menjadi perhatian bersama. Kemudian, untuk mempertahankan kondisi ketahanan sosial komunitas serta pemahaman keberagaman budaya (multikultur) faktor lembaga keagamaan dan adat memegang peranan cukup signifikan. Misalnya adanya lembaga/badan kerjasama antar umat beragama menunjukkan indikasi kuat dapat menjadi peredam munculnya konflik. Dengan perkataan lain adanya lembaga tersebut cenderung dapat menjadi pemersatu warga komunitas yang selanjutnya ketahanan sosial relatif dapat dipersatukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul & Armaidly Armawi, 1998, *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jacob, T., 1998, *Pendidikan Dan Ketahanan Nasional Pada Abad XXI*, dalam *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*, Penyunting Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nasikun, 1991, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nuryana, Mu'man, 2000. *Pengkajian Sistem Ketahanan Sosial Masyarakat Di Daerah Rawan Konflik*, Kantor Masalah-Masalah Kemasyarakatan Departemen Kesehatan Dan Kesejahteran, Jakarta.

- Rajab, Budi, 1996, *Pluralitas Masyarakat Indonesia Suatu Tinjauan Umum*, Prisma, No. 6, Juni, LP3ES, Jakarta.
- Rudito, Bambang. *Peran Media Dalam Pendidikan Multikultur*, *Majalah Informasi Kajian Permasalahan Kesejahteraan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Puslit Permasalahan Sosial, No 1, Maret 2004, Balatbangsos, Dep.Sosial, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi dan Junus Melalatoa, 2004, *Pembangunan Budaya Butuh Pendekatan Multikulturalisme*, dalam *Kompas*, 7/12/2004, Jkarta.
- Warnaen, Suwarsih, 2002, *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis*, Mata Bangsa, Yogyakarta.

BIODATA PENULIS:

Mochamad Syawie, Alumnus Fakultas Pasca Sarjana Progam Studi Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti dan Peneliti Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badiklit Departemen Sosial RI Jakarta.